

Pemkot Didesak Tindaklanjuti Temuan BPK

Gema DPRD



GEDUNG DEWAN-DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot Semarang segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang tahun anggaran 2014. Dewan menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait tersebut.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi berharap pemkot dapat segera menyelesaikannya sesuai arahan dari BPK. Hal itu diutarakannya usai rapat koordinasi dengan Inspektorat selaku lembaga pengendali internal Pemkot di kantor DPRD, Rabu (24/6).

Inspektorat diundang untuk mengetahui dan menjelaskan tindak lanjut atas 22 SKPD yang jadi obyek temuan dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD dari BPK.

"Inspektorat adalah lembaga pengendali internal Pemkot Semarang. Kami minta mereka pro aktif, mengawal dan mengawasi penyelesaian temuan dan rekomendasi dari BPK oleh seluruh SKPD yang menjadi obyek temuan," kata Supriyadi.

Ia mengatakan, Inspektorat harus mengawal supaya semua sesuai arahan BPK. Hasil tindak lanjut tersebut akan dilaporkan ke BPK, kemudian Pemkot harus

membahasnya lagi respon BPK atas hasil tindak lanjut tersebut.

Kelebihan Pembayaran

Dikatakan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) jadi salah satu obyek temuan paling mencolok dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD dari BPK. Dinas ini harus menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK. Yaitu agar pengurangi jumlah bank yang digunakan untuk penyimpanan kas daerah yang selama ini ada di sembilan bank.

Menurut Supriyadi, BPK menilai banyaknya jumlah bank pemegang kas daerah tersebut

membuat pengelolaan keuangan tidak efisien dan efektif. Termasuk laporan bunga, giro, dan deposito menjadi tidak transparan.

"Untuk hal ini, DPKAD sudah menindaklanjuti dengan memangkas jumlah bank, menjadi enam bank pemegang kas daerah," ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Inspektorat Kota Semarang Cahyo Bintarum menjelaskan, dari laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2014 dari BPK ada 21 temuan. Terdiri dari empat temuan kepatuhan dan 17 temuan sistem pengendalian intern (SPI), serta ada 28 rekomendasi. Sedangkan obyek temuan terdiri dari 22 SKPD.

Menurutnya, tindak lanjut sudah ada yang dilakukan sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK diterima pada 29 Mei lalu. Antara

lain, kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Pasar Klithikan Penggaron tahap dua sebesar Rp 7,5 juta pada Dinas Pasar, telah disetor ke kas daerah pada 19 Mei. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Pasar Modern Rejomulyo tahap dua sebesar Rp 12,9 juta juga sudah disetor ke kas daerah pada 19 Mei.

Kemudian, kelebihan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan pembangunan ruang terapi pada RSUD Kota Semarang Rp 5,4 juta juga sudah disetor ke kas daerah pada 20 Mei. Dan kelebihan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan pembangunan GOR Tri Lomba Juang pada Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Rp 74,6 juta juga disetor ke kas daerah pada 19 Mei. (H71, H35-87)